

ABSTRAK

Windy Indrawati (0810612024), Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Seorang Hakim Oleh Komisi Kehormatan Ikatan Hakim Indonesia. Dibawah bimbingan Suherman, SH, LLM.

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Oleh karena itu Hakim harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik Hakim yang ditetapkan dalam organisasi Ikatan hakim Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Hakim dalam menegakan kode etik Hakim dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Hakim. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kode etik perlu diketahui bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh hakim yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik hakim. Untuk meneliti daya mengikat sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Hakim dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara. Dalam pasal 1 bab 1 mengenai ketentuan umum kode etik hakim ikatan hakim Indonesia, Majelis Kehormatan Hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan hakim namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa komisi kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik kepada majelis pengawas, oleh Karena itu hendaknya ikatan hakim Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya demi perbaikan citra dan kualitas hakim dan ikatan hakim Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang diakui sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, sudah selayaknya hakim mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk juga dalam hal hakim diduga melakukan pelanggaran kode etik harus dikepaladepankan azas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari organisasi untuk memberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Kode Etik Hakim, Pedoman Perilaku Hakim dan Ikatan Hakim Indonesia

ABSTRACT

Windy Indrawati (0810612024), Application of the Code of Ethics Violation Penalties A Judge By Commission Honorary Justices Association of Indonesia. Under the guidance of Suherman, SH, LL.M.

Ethics leads one to distinguish between the good and the bad so always put honesty and truth in the run position. The code of ethics is also important as a means of social control. Therefore judges should always run the office according to the code of conduct set out in the organization judge the judges Association of Indonesia has set the obligations and restrictions that must be followed by the judge in enforcing the code of conduct of judges and comply with the laws governing authority Hakim. With the provisions governing the code of conduct need to know how the power of binding sanctions imposed by the commission honorary judges Indonesia ties against judges who violate the code of conduct of judges and legal actions that can be performed by a judge who sanctioned violation of the code of conduct of judges. To investigate the binding power of sanction given by the honorary committee and how the law attempts to do so the writer uses library research methods that are normative and supported by field research through interviews. In chapter 1 chapter 1 of the general provisions of the code of ethics magistrate judge bonding Indonesia, honorary commission has the authority to give advice and opinions to the council watchdog over alleged violations of the code of ethics and the magistracy, but does not explicitly and unequivocally stated that the commission honor to give advice and opinions for dismissal of judges who violate the code of ethics of the assembly supervisor, the bond should therefore judge Indonesia can better consider goals for the improvement and quality of judges and judges bonding Indonesia as the only organization recognized as mandate and public trust, it is proper judge protection of the law in conducting his post as well in the case of judges suspected of committing violations of the code of ethics must be put forward the principle of presumption of innocence and the serious role of the organization to provide legal protection.

Keywords: Code of Ethics of Judges and Judges Association Indonesia